



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

### PERAN KOMPETENSI PEGAWAI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN BAHAN HABIS PAKAI DI SATUAN KERJA PERGURUAN TINGGI NEGERI KOTA BANDUNG

Hastuti

Politeknik Negeri Bandung

[hastuti@polban.ac.id](mailto:hastuti@polban.ac.id)

#### Abstrak

Keberhasilan sebuah organisasi public untuk mencapai tujuan ditunjang oleh semua factor yang ada di dalamnya. Diantaranya adalah dengan tersedianya penunjang berupa persediaan bahan habis pakai. Pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) persediaan habis pakai digunakan untuk menunjang proses kelancaran kegiatan belajar mengajar. Pada ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal pada persediaan bahan habis pakai. Penelitian ini mengevaluasi pengendalian internal persediaan bahan habis pakai dengan menggunakan indikator pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah / SPIP (PP 60 tahun 2008). Dari lima variable yang diukur diketahui bahwa pengendalian internal sudah efektif. Namun terdapat satu unsur yang mempunyai nilai terendah yaitu lingkungan pengendalian dimana di dalamnya terdapat dimensi kompetensi pegawai.

**Kata kunci:** kompetensi pegawai, pengendalian internal, bahan habis pakai

### *Role of Employee Competency in Inventory Internal Control System in Public Universities Bandung*

#### *Abstract*

*The success of a public organization achieving its goals is supported by all the various factors it. Among them is the availability of supporting a number of supplies of consumables. Public universities consumable inventory is used to support the smooth process of teaching and learning activities. In a summary of the results of the Audit Board of Republic Indonesia inspection, it was found that there were weaknesses in internal control of consumables. This study evaluates the internal control of consumable inventory using indicators on Government Internal Control System (PP 60 of 2008). From the five variables measured it is known that internal control has been effective. However, there is one element that has the lowest value, which is the control environment in which there is an employee competency dimension.*

**Keywords:** *employee competency, internal control, consumable inventory*

#### A. PENDAHULUAN

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas manajemen organisasi adalah mengelola organisasi untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan

efisien. Salah satu komponen penting yang harus ada di dalam suatu organisasi untuk membantu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien adalah adanya sistem pengendalian intern atau *internal control*



# 3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

*system*. Tanpa pengendalian intern maka pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih sulit. Oleh karena itu pengendalian intern merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh organisasi (Bayangkara, 2015).

Demikian juga halnya dengan organisasi sektor publik. Ada perbedaan mendasar antara organisasi sektor privat dan organisasi sektor publik, di mana tujuan utama organisasi sektor privat adalah memaksimalkan laba sedangkan tujuan utama organisasi sektor publik adalah memaksimalkan pelayanan publik. Meskipun demikian, kedua jenis organisasi ini sama-sama membutuhkan sistem pengendalian intern untuk mendukung pencapaian tujuannya. Untuk meningkatkan kinerja dan tata kelola yang baik, berbagai faktor internal organisasi perlu ditingkatkan. Salah satu faktor internal yang penting adalah sistem pengendalian intern (Aziz *et al.*, 2105).

Pengendalian intern untuk instansi pemerintah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut PP ini, sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, tujuan organisasi dapat tercapai jika didukung oleh sistem pengendalian intern. Semua unsur pada organisasi termasuk hal yang diatur dalam SPIP termasuk persediaan bahan habis pakai yang merupakan asset organisasi.

Hasil ikhtisar pemeriksaan BPK-RI untuk semester 1 tahun 2018 terkait dengan pengendalian atas pengelolaan persediaan pada kementerian lembaga (KL) belum memadai. Dikarenakan tidak dilakukan stock opname persediaan pada 15 KL yang meliputi nilai Rp 569,92 miliar, kemudian pencatatan

persediaan tidak tertib ditemukan pada 37 KL yang melibatkan nilai persediaan sebesar Rp 370,68 milyar. Akibatnya terjadi ketidakauratan saldo persediaan dalam neraca dan beban persediaan pada laporan operasional. Ini mengindikasikan lemahnya pengendalian internal pada pengelolaan persediaan di KL.

Hal tersebut terjadi pula pada sebuah satuan kerja (satker) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Bandung. Berdasarkan hasil audit BPK ditemukan ketidaksesuaian antara catatan persediaan dan jumlah fisik persediaan pada dua gudang yang ada di Politeknik Negeri Bandung. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) mencatat adanya perbedaan jumlah barang persediaan antara jumlah fisik dan laporan persediaan per 31 Desember 2018. Nilai persediaan yang ada berjumlah Rp 6,153 milyar.

Penyebab lemahnya pengendalian internal atas persediaan akan dievaluasi untuk tujuan peningkatan pengendalian internal. Pengendalian internal akan diukur berdasarkan indikator pada PP 60 tahun 2008.

### B. PEMBAHASAN

Sistem pengendalian intern yang baik bermanfaat bagi organisasi dalam mencegah buruknya kondisi keuangan serta membantu organisasi untuk bekerja secara efektif dan harmonis sambil mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam operasinya (Pathak, 2005; Wardiwiyono, 2012). Organisasi sektor privat mengakui pentingnya sistem pengendalian intern serta manajemen risiko sebagai alat yang berguna dalam menjaga pencapaian keseluruhan tujuan perusahaan dan dalam meningkatkan nilai pemegang saham (Aziz, 2013).

Sistem pengendalian intern juga memainkan bagian penting dalam praktik audit intern karena auditor intern dapat dianggap sebagai ahli dalam pengendalian manajemen (Fadzil *et al.*, 2005). Oleh karena itu, menurut Bowrin (2004), sistem pengendalian intern merupakan komponen integral dari struktur tata kelola keseluruhan

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

organisasi, yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

Dalam organisasi sektor publik, peran pengendalian intern adalah untuk mendukung pembentukan sistem sambil mendorong akuntabilitas pengambil keputusan (Bianchi, 2010). Namun, kegagalan untuk membangun sistem yang andal dapat membahayakan organisasi dalam banyak hal termasuk risiko terhadap upaya memelihara akuntabilitas sektor publik. Ketergantungan yang lebih tinggi pada sistem pengendalian harus dikaitkan dengan harapan yang lebih tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi (Liu, 2011). Karena sistem pengendalian intern memberikan penekanan terhadap akuntabilitas, maka praktiknya di sektor publik sangat penting.

COSO (2004) merinci tiga tujuan pengendalian intern yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, reliabilitas/keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan. Senada dengan SPIP (PP 60 tahun 2008) bahwa tujuan pengendalin internal meliputi proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas unsur :

- a. lingkungan pengendalian;
- b. penilaian risiko;
- c. kegiatan pengendalian;
- d. informasi dan komunikasi; dan
- e. pemantauan pengendalian intern.

Pengendalian internal biasa diukur untuk melihat keefektifan dan keefisienan penerapannya. Pada penelitian ini diukur dengan kuesioner yang dikembangkan dari indikator pada pengendalian intern (COSO 2004, SPIP 2008). Kuesioner disusun pada

skala likert. Kuesioner telah diukur reliabilitas dan validitasnya. Responden pada penelitian ini adalah bagian yang berhubungan dengan pengelolaan persediaan. Dari hasil identifikasi maka diperoleh 21 responden yang memberikan jawaban. Dari hasil jawaban kuesioner kemudian dianalisis tingkat keefektifannya dengan skor sebagai berikut:

## Persentase dan Ukuran Penilaian Efektivitas

Persentase Penilaian	Ukuran Penilaian
0% - 25%	Tidak Efektif
25,01% - 50%	Kurang Efektif
50,01% - 75%	Cukup Efektif
75,01% - 100%	Efektif

Sumber: Sugiyono (2009)

Setelah melalui analisis data maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian, 0,590, efektif
- b. Penilaian risiko, 0,8000, efektif
- c. Kegiatan pengendalian, 0,6700
- d. Informasi dan komunikasi, 0,760, efektif
- e. Pemantauan pengawasan, 0,789. Efektif

Hasil analisis menunjukkan semua unsur telah efektif. Namun terdapat unsur lingkungan pengendalian yang nilai pencapaiannya paling rendah dimana di dalamnya terdapat 7 sub unsur. Namun enam dimensi di antaranya yaitu Integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Struktur organisasi, Kebijakan dan pembinaan SDM, serta Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki skor rata-rata di bawah 0,5000 yang berarti kurang efektif. Hanya ada satu dimensi yaitu Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang memiliki skor di atas 0,5000 yaitu 0,6563 atau 65,63% yang berarti cukup efektif. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, secara faktual sesungguhnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sudah ada dengan dibentuknya bagian administrasi/operator yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan persediaan,

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

namun belum berjalan dengan baik karena sesungguhnya belum ada SOP secara tertulis yang terdokumentasi, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing pegawai yang ditugaskan pun belum jelas, sehingga upaya mencapai tujuan berupa pengelolaan persediaan pun masih berjalan berdasarkan hasil pertimbangan dan pemikiran pihak tertentu saja dan koordinasi pun belum berjalan efektif.

Jika dikaji maka terdapat unsur kompetensi pegawai dalam dimensi tersebut yang masih lemah. Peran karyawan yang cakap dan jujur sangat besar pada keberhasilan implementasi sebuah system. Sehingga diperlukan tindak lanjut berupa; (1) penyelesaian permasalahan pencatatan persediaan dengan melakukan opname fisik, koreksi dan perbaikan pencatatan, (2) pembinaan yang intensif dan sosialisasi terkait dengan konsep barang persediaan, penatausahaannya dan pembebanan anggaran belanja sesuai dengan akunnya.

Peran kompetensi SDM menjadi penting dalam pengendalian internal persediaan. Walaupun unsur yang lain dinyatakan efektif, namun jika personel pelakunya kurang kompeten maka dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah system. Kompetensi SDM bisa ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, yang dipercayai merupakan instrument utama dalam pengembangan kompetensi SDM/pegawai (Dessler, 2007; Handoko, 2001; Sedarmayanti, 2009; Sudarmanto, 2009). Instrumen pendidikan dan pelatihan juga yang digunakan untuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan PP No, 101 tahun 2000.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Evaluasi pengendalian internal persediaan bahan habis pakai pada satker PTN yang menjadi objek penelitian dinilai efektif. Hanya terdapat satu unsur yang dirasakan lemah yaitu lingkungan pengendalian dimana didalamnya terdapat sub unsur kompetensi pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai harus dilakukan untuk

menunjang keberhasilan implementasi sebuah sistem, termasuk sistem pengendalian internal.

## REFERENSI

- Aziz, N. A. A. (2013). Managing corporate risk and achieving internal control through statutory compliance. *Journal of Financial Crime*, 20(1): 25-38.
- Aziz, M.A.A., Rahman, H.A., Alam, M.M., and Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28: 163-169.
- Bayangkara, IBK. (2015). *Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Bianchi, C. (2010). Improving performance and fostering accountability in the public sector through system dynamics modelling: From an "external" to an "internal" perspective. *Systems Research and Behavioral Science*, 27: 361-384.
- Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO). 2004. *Internal Control Integrated Frame Work*. New York: AICPA.
- Bowrin, A. R. (2004). Internal control in Trinidad and Tobago religious organizations. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(1): 121-152.
- Dessler, G. 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, terjemahan Jakarta: Prenhalindo
- Fadzil, F. H., Haron, H., Jantan, M. (2005). Internal auditing practices and internal control system. *Managerial Auditing Journal*, 20(8): 844-866.
- Handoko, HT, 2001, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Liu, O. (2011). Outcomes assessment in higher education: Challenges and future research in the context of voluntary system of accountability. *Educational Measurement: Issues and Practice*, 30: 2-9.
- Pathak, J. (2005). Risk management, internal controls and organizational



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

vulnerabilities. *Managerial Auditing Journal*, 20(6): 569-577.

Sedarmayanti, 2009, Manajemen SDm, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Bandung, Refika Aditama.

Sudarmanto, 2009, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Wardiwiyo, S. (2012). Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4): 340-352.

## Dokumen

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2018

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil